

**POLA INTERAKSI BERBASIS AGAMA
PADA MASYARAKAT RAWAN KONFLIK
DI KABUPATEN SIGI**

A. Markarma

(Desen FTIK Institut Agama Islam Negeri Palu)

Abstract:

As a new regency, Sigi should improve itself to organize the society life. The religion awareness in conflict-prone areas is very urgent to be improved. In the perspective of civil society, social conflicts that occur as a result of lack of public communication. Based on this assumption, researcher entitled this research: Interaction Patterns based on Religion in Conflict-Prone Communities in Sigi. Researcher focused on two sub subject: (1) how the interaction patterns based on religion in conflict-prone communities in Sigi. (2) how the implications for efforts to resolve social conflicts in Sigi regency. Research results showed that patterns of community interaction in conflict-prone areas in Sigi was pretty good. There are approximately 60% of respondents who support this conclusion. But the fabric of social interaction society merely casual relationships, not based on a good understanding of religion. Therefore, efforts to resolve social conflict is not significant. Approximately 46% of respondents believe that the faith-based social interaction patterns are less effective in the resolution of social conflicts. As a result, social interaction in conflict-prone areas in Sigi is not in line with the spirit of religion.

Keywords: *Patterns of Interaction, Religion, Conflict Prone*

PENDAHULUAN

Layak dicermati, kenapa dalam masyarakat yang santun tiba-tiba muncul konflik dalam skala pribadi, keluarga dan kelompok. Konflik ini kadang berbasis identitas kadang berbasis kepentingan, kadang berbasis persoalan sepele. Karena masyarakat sulit memahami diri sendiri, maka rentetan berikutnya adalah munculnya sikap apriori untuk memahami keberadaan orang lain atau kelompok lain. Lebih-lebih masyarakat yang miskin yang tidak memiliki agenda kegiatan bersama. Masyarakat yang dipenuhi dengan masalah yang berakar pada kesulitan hidup.

Dalam kondisi demikian, memahami agama menjadi hal yang tidak boleh dinstakan. Kenapa, karena agama adalah perekat kemanusiaan yang mengajarkan perbedaan sebagai fakta yang hasur diterima dengan bijak. Konflik yang ditengarai karena agama adalah keliru. Yang benar adalah karena kurangnya pemahaman terhadap semangat agama yang dianut. Keyakinan bahwa agama yang dianut sebagai agama “paling benar” memang harus dimiliki setiap pemeluk agama. Tetapi keyakinan tersebut harus dijaga jangan sampai menyinggung agama lain yang juga diyakini kebenarannya oleh orang lain.

Keyakinan akan kebenaran agama sendiri harus disertai dengan penghargaan terhadap keyakinan agama lain.¹ Karena itu, pemahaman agama sangat ditumbuhkan untuk meredam konflik yang kerap terjadi dalam masyarakat. Menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan sebagaimana yang diajarkan agama harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat untuk meredam benih-benih konflik sosial.

Keberadaan individu sejak awal terikat secara agama dan budaya. Karena itu, heterogenitas agama dan budaya masyarakat seharusnya dapat memberi pembelajaran, bagaimana mengelola konflik dan mengelola kehidupan masyarakat yang heterogen.² Dalam konteks ini, pemahaman agama tentu sangat signifikan mengatasi persoalan-persoalan konflik sosial dalam masyarakat. Agama mengakomodir keberagaman budaya dalam satu bingkai

¹Aso Sentana, *Agama dan Nilai-Nilai Kebersamaan*, (Cet. III; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 61.

²*Ibid.*, h. 62.

kebersamaan dalam meraih kebaikan dan tujuan hidup yang disepakati bersama (*good life*).

Secara faktual, pola interaksi masyarakat mengabaikan nilai-nilai kebersamaan. Kondisi inilah yang memicu terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan dalam sebuah masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat dilihat dari maraknya konflik sosial yang berujung pada perpecahan yang memicu kasus-kasus kerusuhan antar suku, golongan bahkan agama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Semua itu karena minimnya wawasan agama yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, bahwa agama menghargai perbedaan.

Pemahaman agama adalah satu di antara indikator keberhasilan sebuah masyarakat keluar dari konflik sosial yang berkepanjangan. Secara ekonomi banyak warga masyarakat yang hidup dalam kondisi pas-pasan bahkan ada yang hidupnya dipenuhi hutang. Dalam kondisi mengalami kesulitan hidup secara sosial budaya, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dirinya sendiri dan menerima keberadaan orang lain dan kelompok lain.

Fakta inilah yang menjadi penyebab menumpulnya kerukunan di masyarakat. Lebih-lebih masyarakat yang miskin atau hampir tidak memiliki agenda kegiatan bersama.³ Hidup mereka habis untuk mencari uang untuk mempertahankan hidup mereka dan keluarganya. Hampir-hampir tidak tersedia waktu untuk hanya sekedar bertegur sapa dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya. Itulah peta kasar kondisi masyarakat sekarang ini terutama mereka yang tinggal dan mencari penghidupan di perkotaan.

Kemampuan untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai haruslah ditanamkan kepada masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan wawasan keagamaan. "Hal ini bertujuan agar nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan oleh semua agama dapat membumi dalam kehidupan masyarakat."⁴ Pola interaksi berbasis agama memang sangat

³M. Amin. Abdullah, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, (Surakarta: Pusat Studi Budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), h. 61.

⁴Abdullah Said, *Membangun Masyarakat Multikultural Berbasis Agama*, (Cet. III; Jakarta: Taman Pustaka, 2006.), h. 87.

ditumbuhkan untuk meredam konflik yang kerap terjadi di tengah masyarakat atas nama agama. Pola interaksi berbasis agama menjadi tuntutan di tengah keragaman dan strategis dalam meredam benih-benih konflik sosial dalam masyarakat.

Peran agama menjadi penting dalam menangani setiap konflik sosial yang terjadi. Semua pihak perlu menyebarluaskan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pola interaksi berbasis agama bagi kehidupan masyarakat yang heterogen. Dengan kata lain, masyarakat memerlukan wawasan keagamaan yang cukup dan memadai dalam mengatasi konflik sosial. Pola interaksi berbasis agama perlu ditumbuh kembangkan pada semua level masyarakat.⁵

Peningkatan dialog antar umat beragama harus berjalan seimbang. Bahkan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan harus menjadi agenda utama. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjamin kebebasan dan kerukunan serta upaya penanganan tindak kekerasan antar umat beragama sampai saat ini ternyata belum memberikan solusi yang berarti. Pemerintah harus memberikan penyelesaian secara adil, cepat, tuntas dan komprehensif. “Salah satu solusi keluar dari masalah sosial adalah masyarakat harus mengamalkan ajaran agamanya.”⁶

Kabupaten Sigi sebagai salah satu kabupaten yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki masyarakat yang sangat heterogen dan multikultur. Heterogenitas dan multikultural ini seharusnya dapat diterima dan dapat dikelola dengan baik untuk menghormati perbedaan dan keberadaan masyarakat yang plural. Sebagai kabupaten baru, tentu harus berbenah diri menata kehidupan masyarakatnya. Kecerdasan menyikapi ketegangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi konflik sosial.

Hasil penelusuran Penulis ke beberapa wilayah di Kabupaten Sigi, ditemukan bahwa faktor pemicu konflik dan kerusuhan bukan karena perbedaan agama dan budaya tetapi

⁵Moeslim Abdurahman, *Multikulturalisme, Tauhid Sosial, dan Gagasan Islam Transformatif*, (Surakarta: Pusat Studi Budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), h. 92.

⁶Muhammad Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2003), h.16.

parsoalan sepele. Hanya karena ketersinggungan dan perkelahian antar anak yang kemudian orang tua masing-masing ikut campur dan membela. Ketika perkelahian beralih isu menjadi ketersinggungan orang dewasa, maka isunya menjadi besar dan terjadilah perkelahian antar kelompok. Kasus lain juga yang memicu perkelahian antar warga karena sengketa batas desa atau masalah air. Bagi orang Kaili, batas desa itu adalah identitas kultural yang tidak bisa dinodai orang lain. Penentuan batas satu daerah yang tidak tuntas inilah yang menjadikan masalah konflik itu sulit dihentikan karena akar masalahnya tidak tersentuh.

Konflik yang berkepanjangan ini melahirkan asumsi bahwa ada *grend desain* dan konspirasi pragmatis untuk tujuan tertentu.⁷ Eskalasi kerusuhan dijadikan semakin beringas, menunjukkan keadaan genting lalu kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Akan tetapi asumsi ini tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak memiliki validitas intelektual.

Pemerintah Kabupaten Sigi telah berupaya keras meredam konflik dengan berbagai model. Melakukan dialog, penyerahan senjata dua bela pihak, dan dilakukan deklarasi, bahkan hingga didamaikan langsung oleh Gubernur Sulteng, Longky Djanggola. Akan tetapi ternyata itu belum efektif dan terulang lagi. Kerusuhan dan konflik sosial sering sekali terjadi di Kabupaten Sigi, sejak tahun 2012 sampai 2014. Komnas HAM perwakilan Sulteng, bahkan menyebutkan angka kerusuhan di Sigi sebanyak 14 kasus, yang melibatkan 12 desa dalam setahun.

Upaya pemecahan masalah kerusuhan masyarakat ini seyogianya tidak disederhanakan. Diperlukan kajian-kajian yang komprehensif dan integratif terhadap pola interaksi masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi. Pendekatan agama dalam interaksi sosial perlu dilakukan sebagai solusi penyelesaian konflik. Berkaitan dengan hal itu, Peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi.

⁷Nurdiansyah, *Menerjemahkan Konflik Sosial di Sigi*, <http://www.mediatadulako/>, diakses tanggal 17 September 2014.

RUMUSAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1). Bagaimana pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi?; 2). Bagaimana implikasinya terhadap upaya mengatasi konflik sosial di Kabupaten Sigi?

Titik tolak dari rumusan masalah ini penting, sebab eksploitasi terhadap kerusuhan sosial yang bersifat luar biasa (*massive*), tentu tidak terjadi secara spontan tetapi lazim didahului oleh pematangan kondisi sosio-psikologis massa. Ini berarti, variabel waktu, pola interaksi sosial, dan pengabaian agama ikut menentukan pra-kondisi konflik sosial.

Penekanan kajian masalah penelitian ini dibatasi pada prinsip agama sebagai salah satu upaya membangun kembali keharmonisan struktur sosial di Kabupaten Sigi. Agama harus didasarkan pada itikad baik yang mengedepankan semua fakta empirik sesuai realitas obyektif tanpa intres kepentingan sesaat.

Dalam konteks ini, maka pokok-pokok pikiran yang disampaikan pertama-tama didasarkan pada suatu gambaran tentang pola hubungan sosial dalam masyarakat yang rapuh dan yang kedua, proses pelemahan pranata sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat dari pesan-pesan agama sebagai katup pengaman potensi konflik sosial.

Untuk melengkapi dua poin di atas, maka pada akhirnya akan dikemukakan pula beberapa pikiran sebagai solusi pemecahan masalah dalam mengembangkan sebuah *platform* baru kehidupan bermasyarakat pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi yang aman, damai dan saling menghargai.

Pola interaksi dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu akan selalu menarik diperbincangkan. Hal ini akan lebih menarik lagi apabila dalam pola interaksi tersebut terjadi konflik sosial yang berujung pada kerusuhan. Perlu ada upaya yang dilakukan dalam merespon fenomena konflik sosial yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat.

Konflik sosial yang berujung pada kerusuhan dan perkelahian antar kelompok masyarakat di Kabupaten Sigi, hingga

saat ini masih sering terjadi. Penyebab konflik sosial memang banyak sekali tetapi yang paling menonjol ditengarai oleh lemahnya kesadaran beragama masyarakat yang terlibat dalam peristiwa kerusuhan tersebut.

Beberapa kasus konflik sosial yang berujung pada kerusuhan dan perkelahian antar kelompok masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Sigi, menjadi bukti nyata tentang rendahnya kesadaran beragama masyarakat. Pada umumnya, masyarakat tidak dewasa melihat dan menerima perbedaan kultur dan kebiasaan pihak lain.

Penelitian tentang pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, sangat signifikan untuk dilakukan. Para akademisi perlu menemukan solusi dan memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mengatasi masalah konflik sosial yang terjadi di sana. Sikap apatis terhadap masalah ini, bukan merupakan suatu hal yang baik untuk dipertontonkan.

PEMBAHASAN

Pola Interaksi Berbasis Agama pada Masyarakat Rawan Konflik di Kabupaten Sigi

Dalam kehidupan sosial, konflik adalah suatu hal yang melekat dan tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, memberikan kontribusi terhadap disintegrasi sosial. Hal ini juga terjadi ketika memperbincangkan pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi. Dalam pola interaksi sosial, agama menekankan rasa keterbukaan, kebersamaan dan saling menghormati.

Untuk melihat pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, maka ada tiga isu penting yang dikaji yaitu: pemahaman agama masyarakat, kesadaran beragama masyarakat dan sikap beragama masyarakat.

1. Pemahaman Agama Masyarakat Kurang

Menarik dicermati ketika menyoroti pola interaksi berbasis agama masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi. Pada umumnya mereka menyadari bahwa interaksi sosial yang dibangun

berdasarkan agama, dapat mewujudkan stabilitas yang dinamis dan menciptakan suasana kondusif bagi keterbukaan dan saling memahami. Dari paparan data penelitian diketahui bahwa pola interaksi masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi masih cukup baik. Dari 550 responden yang tersebar dilima kecamatan, ternyata 60% yang yang berpendapat baik, 29% yang berpendapat sedang, sementara yang berpendapat kurang hanya 10% saja.

Pertanyaan yang muncul adalah jika pola interaksi masyarakat pada wilayah rawan konflik cukup baik, lalu kenapa perkelahian antar kelompok (desa) masih terjadi? Salah satu penyebabnya karena jalinan interaksi sosial masyarakat hanya bersifat hubungan biasa dan tidak didasari oleh pemahaman agama yang baik. Mayoritas masyarakat yang terlibat dalam konflik atau perkelahian antar kelompok (desa), tidak memahami nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan agama. Bahwa agama mengharuskan kebersamaan dan saling menghormati. Interaksi sosial yang mereka bangun sangat rapuh dan mudah goyah ketika terjadi gesekan-gesekan kepentingan yang berbeda.

Pola interaksi sosial masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, tidak diilhami oleh pemahaman agama yang benar. Ditemukan sekitar 74% responden yang mengatakan pola interaksi masyarakat tidak dilandasi oleh pemahaman agama yang baik sehingga tidak menjadi alasan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antar sesama kelompok masyarakat. Mayoritas (46%) masyarakat pada wilayah rawan konflik, tidak mengetahui bahwa interaksi sosial yang mereka lakukan tidak dengan ajaran agama.

Fakta ini menunjukkan bahwa pemahaman agama masyarakat pada wilayah rawan konflik tentang pola interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran agama masih sangat kurang. Mereka tidak memahami bahwa pola interaksi atau hubungan sosial kemasyarakatan sudah diatur dalam ajaran agama. Karena itu penanaman nilai perlu memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai keagamaan melalui bimbingan, kajian dan pencerahan.

2. Kesadaran Beragama Masyarakat Rendah

Interaksi sosial menyebabkan kegiatan hidup masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi semakin kompleks. Jaringan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok sangat bersifat dinamis dan mempunyai pola-pola tertentu. Menurut Burhanuddin dalam hubungan sosial itu, terdapat nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial, yang perlu menjadi rujukan bagi semua anggota masyarakat untuk melakukan sebuah interaksi sosial.⁸

Kesadaran beragama masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, masih sangat rendah. Hal ini dapat disimpulkan dari persentase masyarakat yang kurang memiliki kesadaran beragama mencapai angka 68%. Angka ini, membuktikan rendahnya kesadaran beragama masyarakat dalam membangun pola interaksi pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi. Dengan demikian, interaksi atau hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun masyarakat tidak diikat oleh sebuah kesadaran beragama yang baik. “Sementara ikatan agama sangat kuat untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat dalam polah interaksi yang harmonis dan saling menghargai.”⁹

Pola interaksi berbasis agama pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, tidak berjalan dengan baik. Ada sekitar 55% responden mengatakan bahwa pola interaksi berbasis agama pada wilayah-wilayah rawan konflik tidak berjalan dengan baik. Fakta ini muda dipahami karena kesadaran beragama masyarakat masih sangat rendah, maka pola interaksi atau hubungan sosial masyarakat juga tidak berjalan dengan baik. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran beragama, sering kali terlibat dalam perkelahian antar kelompok, yakni mencapai angka 72%.

Kesadaran beragama masyarakat yang masih sangat rendah, pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, disebabkan karena sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam perkelahian antar

⁸Burhanuddin, *Agama Dialogis:Merenda Dialektika Lokalitas dan Realitas Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2004.), h. 91.

⁹Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 73.

kelompok, tidak menyadari akibat perbuatannya yang akan merusak hubungan sosial kemasyarakatan yang sudah berjalan baik. Masyarakat pada wilayah rawan konflik, yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok, tidak menyadari dampak dan akibat perbuatannya.

Konsikwensi yang muncul kemudian adalah pola interaksi atau hubungan sosial masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, menjadi rapuh dan tidak kuat sehingga ketika terjadi gesekan-gesekan sosial akibat adanya perbedaan kepentingan, maka hubungan sosial rusak seketika dan konflik sosial pun terjadi yang pada akhirnya menyulut kerusuhan dan perkelahian antar kelompok.

3. Sikap Beragama Masyarakat Menyimpang

Pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, tidak terjalin dengan baik karena sikap beragama yang ditampilkan tidak bertitik tolak dari ajaran atau nilai-nilai agama itu sendiri. Batas-batas kebenaran dalam ajaran agama tidak diterjemahkan dalam pola hubungan sosial yang dilakukan. “Sikap beragama yang ditampilkan masyarakat, tidak mampu menciptakan pola interaksi sosial yang harmonis di tengah-tengah kepentingan yang berbeda”.¹⁰ Artinya agama tidak dijadikan sebagai perekat bagi hubungan sosial mereka sehingga tidak dapat lepas dari inters dan kepentingan pribadi.

Masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, memiliki sikap beragama kurang baik. Hal ini dapat disimpulkan dari jawaban responden yang menyebut sikap beragama masyarakat pada wilayah konflik kurang baik, mencapai angka 46%. Jika angka ini ditambahkan dengan jumlah yang memiliki sikap beragama sedang yaitu sebanyak 30%, maka angkanya cukup tinggi yaitu sebanyak 74%. Sementara yang memiliki sikap beragama yang baik hanya sekitar 25% saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pola interaksi masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, menyimpang dari petunjuk agama.

¹⁰Ahmad. Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama dan Kolonialisme, serta Liberalisme*, (Cet.I; Bandung: Mizan, 2005), h. 88.

Pola interaksi masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, tidak didasari dengan sikap beragama yang baik. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden yang menyebut angka mencapai 54%. Sementara pola interaksi yang didasari sikap beragama yang baik hanya 28% dan yang responden yang menjawab tidak tau hanya 18% saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola interaksi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di wilayah-wilayah rawan konflik, tidak bertolak dari sikap beragama yang baik.

Situasi seperti inilah yang menyebabkan masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, sangat mudah terlibat dalam perkelahian antar kelompok. Sebab agama tidak dijadikan pendekatan untuk keluar dari konflik sosial yang berkepanjangan. Masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik tidak menjadikan agama sebagai dasar membangun hubungan sosial yang ideal, tidak memiliki sikap beragama yang baik sehingga sering terlibat dalam perkelahian antar kelompok.

Hal ini dapat disimpulkan dari jawaban responden yang menyebut bahwa keterlibatan mereka dalam konflik dan perkelahian mencapai angka 59%. Sementara yang tidak terlibat dalam perkelahian antar kelompok hanya 25% saja. Jika angka ini ditambah dengan jawaban responden yang menjawab tidak tau yaitu sebanyak 14%, maka jumlahnya pun masih sangat kecil (tidak mencapai 50%). Artinya pemicu salah satu pemicu konflik dan perkelahian adalah mayoritas masyarakat tidak memiliki sikap beragama yang baik.

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang sering terlibat perkelahian antar kelompok pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, tidak mengetahui jika konflik dan perkelahian antar kelompok (desa) itu bertentangan sikap beragama yang baik yang seharusnya mereka jaga. Pola interaksi masyarakat pada wilayah rawan konflik, masih sangat jauh dari harapan dan semangat agama yang menghendaki umatnya hidup rukun. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran serta sikap beragama masyarakat harus dibangun untuk mengatasi konflik sosial.

Implikasi Pola Interaksi Berbasis Agama terhadap Upaya Mengatasi Konflik Sosial di Kabupaten Sigi

Interaksi sosial berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, nampak pada hubungan-hubungan sosial yang terjalin pada masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang diilhami semangat agama ini membentuk pola interaksi yang mengedepankan kebersamaan untuk hidup bersama. “Interaksi sosial berbasis agama pada masyarakat rawan konflik, seharusnya bisa melahirkan pola hidup bersama untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.”¹¹

Jalinan interaksi sosial yang terjadi kemudian menjadi dinamis dan mempunyai pola tertentu yang diikuti oleh semua elemen masyarakat. Untuk melihat lebih jauh implikasi pola interaksi sosial berbasis agama pada masyarakat rawan konflik terhadap upaya mengatasi konflik sosial di Kabupaten Sigi, maka ada tiga isu penting yang akan dibahas yaitu; konflik sosial sebagai tradisi dan volume konflik sosial yang tinggi serta agama sebagai solusi bukan penyebab.

1. Konflik Sosial Sebagai Tradisi

Interaksi sosial dan konflik sosial pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, merupakan dua hal yang dibahas bersamaan karena hubungan antara keduanya. Dalam konteks inilah interaksi sosial dapat dipandang sebagai suatu sistem pada masyarakat rawan konflik untuk saling menerima, saling memahami dan saling menghormati sebagai sebuah proses sosial yang dialami. Sementara itu konflik sosial yang terjadi pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, merupakan benturan-benturan sosial yang terjadi akibat perbedaan kepentingan yang saling memaksakan.

Interaksi sosial memungkinkan adanya kehidupan bersama. Tetapi interaksi sosial yang tidak harmonis akan melahirkan konflik sosial.¹² Sehubungan dengan pendapat ini, maka implikasi pola interaksi sosial berbasis agama pada masyarakat rawan konflik

¹¹Abdullah Said, *Membangun Masyarakat Multikultural Berbasis Agama*, (Cet. III; Jakarta: Taman Pustaka, 2006.), h. 87.

¹²Ahmad. Baso, *op. cit.* h. 89.

sehubungan dengan adanya upaya mengatasi konflik sosial di Kabupaten Sigi ternyata tidak signifikan. Sekitar 76% responden berpendapat bahwa pola interaksi sosial berbasis agama tidak berpengaruh banyak pada penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Jika pola interaksi sosial berbasis agama tidak efektif mengatasi konflik sosial, hal itu disebabkan karena memang masyarakat pada wilayah rawan konflik memiliki pemahaman agama kurang, kesadaran beragama rendah dan sikap beragama menyimpang. Akibatnya pola interaksi sosial berbasis agama tidak berjalan dengan baik dalam arti hubungan sosial masyarakat di wilayah itu tidak sejalan dengan agama.

Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bahwa hanya 18% saja yang mengatakan pola interaksi sosial berbasis agama berjalan dengan baik. Sementara yang menyatakan tidak cukup banyak yaitu sekitar 38%, bahkan yang menjawab tidak tau angkanya cukup besar yaitu mencapai 48%. Fakta ini membuktikan bahwa pendekatan agama sulit mengatasi konflik sosial di Kabupaten Sigi. Jika diakumulasi maka ada sekitar 54% responden melihat pola interaksi sosial berbasis agama tidak dapat mengatasi konflik sosial yang terjadi pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi. “Alasannya karena memang masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik itu tidak menjadikan agama sebagai dasar dalam menjalin hubungan sosial”.¹³

Kesimpulan ini didukung oleh fakta di lapangan bahwa masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, yang terlaibat dalam perkelahian antar kelompok adalah dari semua tingkatan umur. Mulai dari anak-anak yang masih berumur belasan tahun, anak muda, orang dewasa dan bahkan didominasi oleh orang tua. Mencermati data di atas, maka jelas bahwa anak-anak juga terlibat dalam perkelahian antar kelompok, bahkan dalam beberapa peristiwa kerusuhan, hanya diawali perkelahian antar anak-anak yang bermasalah dengan orang lain, kemudian dicampuri oleh orang tua dan keluarga.

Sementara anak-anak muda yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok mencapai angka 18%, ini merupakan angka yang

¹³Surahman, *Konflik Horisontal dalam Penguasaan Sumber Daya Sosial, Studi Kasus di Poso Sulawesi Tengah*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2007), h. 102.

signifikan untuk ukuran anak muda untuk terlibat dalam perkelahian. Adapun orang dewasa angkanya malah sangat tinggi yaitu mencapai angka sekitar 34%, sementara itu, orang tua yang terlibat perkelahian angkanya paling tinggi yaitu mencapai sekitar 40%. Dapat disimpulkan bahwa dalam situasi masyarakat yang semuanya terlibat dalam masalah konflik sosial, maka perkelahian antar kelompok kemudian menjadi hal biasa atau “tradisi” sehingga memang sulit dihentikan. Sebab masyarakat tidak menjadikan agama sebagai dasar dalam menjalin hubungan sosial.

2. Volume Konflik Sosial Sangat Tinggi

Relasi sosial merupakan hubungan antar manusia, di mana relasi tersebut akan menentukan struktur masyarakat pada wilayah-wilayah konflik di Kabupaten Sigi. Relasi sosial ini didasarkan pada komunikasi antar individu dalam masyarakat. “Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat akan selalu mencari individu atau pun kelompok lain untuk dapat berkomunikasi”.¹⁴ Dengan komunikasi itu, maka hubungan atau relasi sosial pun akan terjalin dengan baik. Namun ketika komunikasi ini rusak karena gesekan-gesekan sosial, maka konflik sosial itu pun muncul yang kemudian berakhir pada perkelahian massa.

Volume konflik sosial pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, memang cukup tinggi. Dari keseluruhan responden yang memberikan tanggapan, ada sekitar 46% yang membenarkan hal itu. Adapun yang mengatakan volume konflik sosial sedang juga cukup signifikan yaitu sekitar 30%. Sementara responden yang menjawab tidak tau angkanya sangat kecil yaitu sekitar 25% saja dan angka ini tentu tidak mempengaruhi volume konflik sosial yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa volume konflik sosial pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi memang sangat tinggi.

Menjawab pertanyaan apakah pola interaksi berbasis agama dapat mengurangi konflik sosial di Kabupaten Sigi, mayoritas (48%) jawaban responden mengatakan bahwa pola interaksi

¹⁴Syamsul Arifin, *Muhammadiyah Akomodasi Kultural dan Penguatan Pluralitas*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 40.

berbasis agama dapat mengatasi konflik sosial. Artinya pendekatan agama tidak cukup untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi. Sementara ada sekitar 40% responden yang mengatakan bahwa pola interaksi berbasis agama tidak dapat mengurangi konflik sosial dan yang menjawab tidak tau hanya 12% saja. Jika mencermati jawaban responden secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa perlu pendekatan yang komprehensif dalam upaya mengatasi konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sigi.

Volume konflik pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, memang cukup tinggi. Karena itu pola interaksi berbasis agama perlu dibangun melalui pemahaman agama yang baik dan kesadaran serta sikap beragama yang benar. "Masyarakat tidak boleh mementingkan diri sendiri dan mempertahankan sikap egoisme, tetapi juga harus menjaga hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis."¹⁵

Secara umum masyarakat juga melihat pentingnya pola interaksi berbasis agama ditumbuh kembangkan pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang setuju agar pola interaksi berbasis agama dijaga dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat yakni mencapai 58%. Sementara yang tidak setuju hanya 14% saja dan yang tidak tau angkanya juga tidak signifikan yaitu sekitar 27%. Dengan demikian secara implisit dapat dipahami bahwa pola interaksi sosial yang selama ini terjalin dalam masyarakat pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, memang diakui oleh mayoritas masyarakat masih jauh dari semangat dan nilai-nilai moralitas agama.

Penyebab konflik sosial yang berakhir dengan perkelahian antar kelompok yang selama ini terjadi pada wilayah-wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, sama sekali bukan karena faktor agama. Bahwa ada sekitar 60% responden yang menyatakan bahwa konflik sosial bukan disebabkan oleh faktor perbedaan agama. Sementara responden yang menjawab tidak tau juga angkanya tidak signifikan yaitu hanya 31% saja, ditambah dengan yang menjawab ya hanya 9%. Artinya posisi agama dalam konteks ini bukan

¹⁵Aso Sentana, *Agama dan Nilai-Nilai Kebersamaan*, (Cet. III; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 81.

penyebab tetapi solusi untuk keluar dari konflik sosial yang selama ini sangat sulit dihentikan.

3. Agama sebagai Solusi Bukan Penyebab

Ketika interaksi sosial yang harmonis hilang pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, ini merupakan dampak dari jauhnya mereka dari semangat dan nilai-nilai sosial ajaran agama. Rasa empati terhadap orang lain atau kelompok lain hilang diganti dengan rasa ingin menguasai dan menyakiti.

Masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, pada umumnya tidak mampu memahami dan melaksanakan pesan-pesan moral agama serta menempatkannya dalam kehidupan sosial. Sehingga agama tidak lagi bisa menyatukan perpecahan dan perbedaan yang ada di antara mereka, akibat adanya inters dan kepentingan pribadi yang dipaksakan. Konflik sosial yang berakhir dengan perkelahian antar kelompok akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Meskipun masyarakat menyadari bahwa agama bukanlah penyebab konflik sosial, tetapi mereka juga kurang memahami bahwa agama mengajarkan hidup damai dalam bingkai nilai-nilai moral agama yang saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Dari jawaban-jawaban responden yang ditampilkan pada data di atas, nampak jelas bahwa penyebab konflik sosial pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, sama sekali bukan karena faktor agama, tetapi faktor interes dan kepentingan pribadi yang dipaksakan oleh salah satu kelompok kepada pihak lain. Sekitar 68% responden yang menyatakan bahwa konflik sosial bukan disebabkan oleh faktor perbedaan agama, tetapi karena faktor interes dan kepentingan pribadi. Sementara responden yang menjawab tidak, angkanya tidak signifikan yaitu hanya sekitar 18% saja, ditambah dengan yang menjawab tidak tau hanya 14%.

Pada sisi lain, mayoritas masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, tetap mengharapkan pendekatan agama dalam upaya mengatasi konflik sosial dalam masyarakat. Kesimpulan ini dapat dilihat pada jawaban responden yang setuju bahwa pelaksanaan agama yang benar dapat menagatsi konflik sosial. Dari keseluruhan responden yang memberikan tanggapan, ada sekitar 70% yang setuju bila pola interaksi berbasis agama itu ditumbuh kembangkan dalam masyarakat rawan konflik.

Sementara yang tidak sependapat dengan itu, angkanya hanya kecil sekali yaitu sekitar 10% saja, termasuk yang menjawab tidak tau hanya 20% saja.

Mayoritas masyarakat pada wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, tetap mengakui bahwa agama merupakan sebuah jalan untuk terciptanya interaksi serta jalinan sosial yang harmonis antar sesama anggota masyarakat. Masyarakat menganggap ketaatan beragama itu sangat penting dalam membangun sebuah hubungan sosial yang harmonis. Kesimpulan ini didasarkan pada jawaban responden bahwa sekitar 52% masyarakat yang taat beragama tidak terlibat dalam perkelahian antar kelompok.

Sementara yang ikut terlibat perkelahian antar kelompok hanya sekitar 20% saja, sebuah angka yang tidak signifikan, apalagi yang menjawab tidak tau masih lebih banyak jumlahnya yaitu sekitar 29%. Dengan demikian, ketaatan beragama perlu dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam rangka mengatasi konflik sosial yang terjadi wilayah konflik di Kabupaten Sigi. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas (68%) responden yang berpendapat bahwa pendekatan agama perlu dalam mengatasi konflik sosial di Kabupaten Sigi. Sementara responden yang tidak sependapat jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya 14% saja dan yang menjawab tidak tau sebanyak 18%.

Sesuai dengan visinya, pendekatan agama seharusnya dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sigi. Sebagaimana dipahami bahwa dalam agama diajarkan bagaimana manusia menjalin hubungan sosial yang harmonis antar sesama anggota masyarakat. “Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan manusia yang baik adalah manusia yang berguna atau bermafaat untuk manusia lainnya.”¹⁶

Agama dalam konteks konflik sosial yang sering terjadi di beberapa wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, perlu diposisikan sebagai kekuatan penyatu dan kohesi sosial. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai perekat yang menyatukan dan

¹⁶Mansour Faqih, *Analisis Konflik dan Transformasi Sosial*, (Cet. III; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 67.

menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Meskipun selalu menghadapi perubahan sosial, tetapi agama dapat mempersempit potensi konflik sosial karena agama menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Mengingat pentingnya pemahaman agama bagi masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkannya. Karena itu, secara substansial agama sesungguhnya dapat menjadi solusi nyata bagi penyelesaian konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah rawan konflik jika pemahaman dan sikap beragama masyarakat itu sendiri jauh dari semangat agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada sub pokok masalah telah dibahas dalam penelitian ini, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*: Pola interaksi berbasis agama pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena pemahaman agama masyarakat pada wilayah tersebut berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan oleh agama sangat minim. Konsikwensinya adalah kesadaran dan sikap beragama masyarakat “menyimpang” dari ajaran agama itu sendiri. Jaringan interaksi sosial masyarakat hanya bersifat hubungan biasa dan tidak didasari oleh pemahaman agama yang baik. Kondisi ini membuat hubungan sosial yang dibangun mudah putus, ketika terjadi gesekan-gesekan kepentingan dalam masyarakat. Secara faktual, mayoritas masyarakat yang terlibat dalam konflik sosial atau perkelahian antar kelompok, memang tidak memahami nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan agama; *Kedua*: Implikasi pola interaksi berbasis agama terhadap upaya mengatasi konflik sosial di Kabupaten Sigi, tidak signifikan. Interaksi sosial berbasis agama pada masyarakat rawan konflik tidak melahirkan pola hidup bersama untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Jaringan interaksi sosial yang terjadi kemudian tidak dinamis dan tidak mempunyai pola tertentu yang dapat diikuti oleh semua elemen masyarakat. Benturan-benturan kepentingan yang terjadi pada masyarakat rawan konflik tersebut, kemudian memicu konflik sosial yang “mentradisi” karena sudah melibatkan semua

elemen masyarakat dari semua tingkatan umur. Dampaknya adalah volume konflik sosial sangat tinggi dan sulit diatasi, akan tetapi pola interaksi berbasis agama minimal dapat mempersempit potensi konflik sosial yang ada.

Implikasi Penelitian

Dalam menyikapi ketegangan sosial yang sering kali muncul pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, maka pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta semua elemen masyarakat, untuk secara bersama-sama menciptakan pola interaksi berbasis agama yang ditaati bersama.

Pemahaman agama yang benar pada masyarakat rawan konflik di Kabupaten Sigi, harus ditanamkan lebih awal pada segenap anggotanya agar memiliki persepsi dan sikap terbuka, bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak kultur dan bahasa, serta menghormati hak orang lain sesuai dengan semangat dasar agama.

Pola interaksi berbasis agama dalam konteks konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah rawan konflik di Kabupaten Sigi, agama perlu diposisikan sebagai kekuatan penyatu dan kohesi sosial. Dalam hal ini, semua elemen masyarakat di wilayah itu menjadikan agama sebagai perekat yang menyatukan hubungan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. (2003), *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta: Pusat Studi Budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Abdurrahman, Moeslim. (2005). *Multikulturalisme, Tauhid Sosial, dan Gagasan Islam Transformatif*, Surakarta: Pusat Studi Budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arifin, Syamsul. (2000). *Muhammadiyah Akomodasi Cultural dan Penguatan Pluralitas: Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press.
- Banawiratma, JB. (2007). *Agama dalam Pandangan Fundamentalis*, Cet. III; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Baso, Ahmad. (2005). *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Cet. III; Bandung: Mizan.

- Burhanuddin. (2004). *Agama Dialogis:Merenda Dialektika Lokalitas dan Realitas Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: LkiS.
- Faqih, Mansour. (2011). *Analisis Konflik dan Transformasi Sosial*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaluddin, (2005). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Liliweri, Alo. (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: LkiS.
- Nurdiansyah, *Menerjemahkan Konflik Sosial di Sigi*, [http://www.ci.id.mediatadulako//Konflik Sosial](http://www.ci.id.mediatadulako//Konflik_Sosial), diakses tanggal 17 September 2014.
- Muhammad Sufyan Raji. (2003). *Mengenal Aliran-Aliran Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya*, Cet. III; Jakarta: Pustaka al-Riyadl.
- Said, Abdullah. (2006). *Membangun Masyarakat Multikultural Berbasis Agama*, Cet. III; Jakarta: Taman Pustaka.
- Sentana, Aso. (2008). *Paradigma Nilai-Nilai Kebersamaan*, Cet. III; Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Surahman. (2007). *Konflik Horisontal dalam Penguasaan Sumber Daya Sosial, Studi Kasus di Poso Sulawesi Tengah*, Bandung: Universitas Padjajaran.